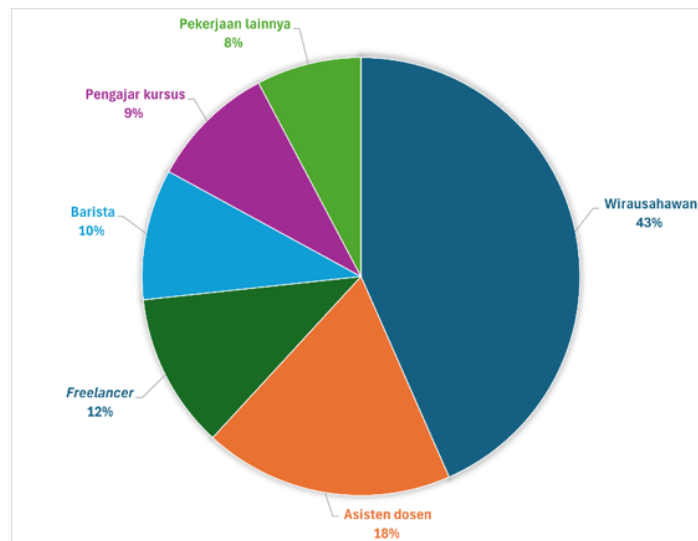


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mahasiswa dipandang sebagai calon penerus bangsa yang mampu mendorong perubahan positif pemanfaatan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Dalam perannya sebagai insan akademik, mahasiswa pada dasarnya diarahkan untuk memprioritaskan pengembangan kapasitas intelektual serta menuntaskan tanggung jawab pendidikan sebagai bekal menghadapi masa depan (Juita et al., 2021). Meski demikian, pada praktiknya muncul kecenderungan meningkatnya upaya mencapai kemandirian ekonomi seiring dengan aktivitas perkuliahan. Survei biaya hidup mahasiswa tahun 2024 yang dilakukan oleh Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) memperlihatkan bahwa lebih dari seperempat mahasiswa menjalani studi sambil bekerja, dengan berwirausaha sebagai pilihan utama yang diminati sebesar 43,41 persen (Zulfikar, 2024).



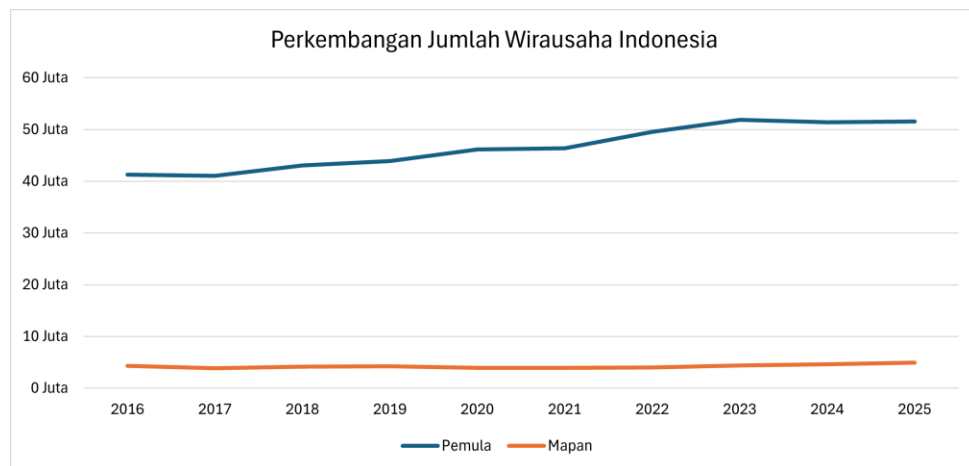
Gambar 1.1 Profesi Mahasiswa Kuliah sambil Bekerja

Sumber: Detik.com (diolah peneliti 2025)

Partisipasi mahasiswa dalam aktivitas usaha ini menandakan semakin kaburnya batas antara dunia pendidikan dan praktik ekonomi, sekaligus mencerminkan peran mahasiswa sebagai agen inovasi yang mulai memberi kontribusi nyata dalam dinamika ekonomi masyarakat. Fenomena tumbuhnya wirausahawan muda dari lingkungan kampus ini juga sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional dengan sektor kewirausahaan yang tengah menunjukkan laju pertumbuhan yang semakin kuat.

Beberapa tahun terakhir ini, kewirausahaan semakin tampak sebagai fenomena yang berkembang di tengah masyarakat. Selama kurang lebih satu dekade, jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan usaha di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang sejalan dengan dinamika ekonomi serta perubahan pada pasar kerja. Data riset *Databoks* mengungkapkan bahwa hingga akhir Agustus 2025, secara akumulatif jumlah wirausaha pemula telah bertambah sekitar 10,28 juta orang, atau

mengalami kenaikan sebesar 25 persen dibandingkan kondisi pada Februari 2016. Di sisi lain, kelompok wirausaha mapan juga mengalami pertumbuhan sekitar 1,04 juta orang atau meningkat 26 persen, sehingga totalnya kini mencapai 5,06 juta orang.



Gambar 1.2 Tren Perkembangan Jumlah Wirausaha Indonesia

Sumber: Katadata.co.id (diolah peneliti 2025)

Wirausaha dapat dimaknai sebagai proses mengelola individu serta berbagai sumber daya yang tersedia guna menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan gagasan atau solusi yang bersifat inovatif dalam menjawab berbagai permasalahan, sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi (Syariati, 2022). Aktivitas kewirausahaan juga memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam penciptaan lapangan kerja serta menjaga kestabilan ekonomi nasional. Hal ini tercermin dari kemampuan sektor usaha mikro hingga menengah dalam menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional, serta kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai kurang lebih 61 persen (Revo, 2024). Besarnya peran

tersebut menegaskan bahwa kewirausahaan merupakan salah satu fondasi utama dalam mempertahankan keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kegiatan berwirausaha kerap dipandang sebagai alternatif yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh sekaligus mempertahankan sumber pendapatan (Saputri & Kholid, 2021). Relevansi pilihan ini semakin menguat seiring dengan kondisi perekonomian yang cenderung tidak stabil.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat mengalami penurunan tipis dari 4,91 persen pada Agustus 2024 menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025, jumlah pengangguran secara nominal justru meningkat hingga sekitar 7,28 juta orang, dengan proporsi terbesar berasal dari kelompok usia muda. Tekanan ekonomi juga terlihat dari meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan sebanyak 42.385 pekerja terkena PHK hingga Juni 2025, atau naik sekitar 32 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Puja Pratama, 2025).

Peningkatan PHK mengindikasikan bahwa sektor formal belum sepenuhnya mampu menampung pertambahan angkatan kerja secara optimal. Kondisi tersebut menempatkan kewirausahaan sebagai penopang penting bagi masyarakat usia produktif yang tidak terserap dalam pasar kerja formal. (Brammantio et al., 2023).

Besarnya kontribusi kewirausahaan tersebut, pada kenyataannya belum sepenuhnya diimbangi oleh kualitas pengelolaan usaha yang memadai.

Berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan akses pembiayaan dan pengelolaan keuangan, masih menjadi persoalan mendasar yang belum terselesaikan secara tuntas (Aulia et al., 2022). Kondisi tersebut tercermin dari kualitas pengelolaan keuangan pelaku usaha yang masih belum optimal. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025 yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan nasional berada pada angka 66,46 persen. Terlepas dari adanya peningkatan di tahun sebelumnya, capaian ini tetap mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep dan praktik pengelolaan keuangan masih berada pada kategori menengah dan belum sepenuhnya terimplementasi dalam aktivitas usaha sehari-hari (OJK, 2025).

Implikasi dari lemahnya pengelolaan keuangan dapat terlihat dari kondisi meningkatnya risiko pembiayaan, khususnya dalam bentuk kredit bermasalah. Salah satu fenomena yang paling mencolok adalah kenaikan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) pada segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan bagian dari pelaku usaha. Pada Oktober 2025, rasio NPL UMKM tercatat mencapai 4,51 persen, dengan nilai kredit bermasalah secara nominal sekitar 67,5 triliun rupiah dari total penyaluran kredit UMKM yang mencapai kurang lebih 1,5 kuadriliun rupiah (Enciety, 2025). Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Hasibuan, menyatakan bahwa tingginya NPL pada sektor UMKM memiliki keterkaitan erat dengan praktik pengelolaan keuangan UMKM yang masih

belum berjalan secara optimal, sehingga memperbesar potensi terjadinya gagal bayar (VoxLampung, 2024).

Buruknya pengelolaan keuangan juga tidak terlepas dari praktik pencatatan keuangan yang belum tertata secara sistematis pada banyak pelaku UMKM, sehingga lembaga keuangan menghadapi kesulitan dalam menilai kemampuan pembayaran secara akurat (Enciety, 2025). Lemahnya sistem pencatatan tersebut berdampak pada tidak terkontrolnya arus kas usaha, yang menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan belum sepenuhnya dibarengi dengan kesiapan dan kedisiplinan pelaku usaha dalam mengelola keuangan secara berkelanjutan.

Permasalahan pada lemahnya sistem pencatatan keuangan tersebut menjadi semakin kontras ketika dihadapkan pada realitas dari kemajuan teknologi dan akses digital saat ini. Pada era digital, kemampuan memanfaatkan teknologi dan inovasi memegang peranan penting dalam mengembangkan serta mempertahankan kelangsungan usaha (Akbar & Fitriaty, 2024). Ketersediaan berbagai teknologi, khususnya dalam bidang *financial technology*, memungkinkan pengelolaan keuangan usaha dilakukan secara lebih efektif melalui akses informasi yang cepat dan akurat terkait pendapatan, pengeluaran, serta arus kas secara real time. Hal ini memberi peluang lebih besar bagi pelaku usaha untuk menjaga kesehatan keuangan sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan keputusan secara berkelanjutan (Yulianto & Rita, 2023).

Berbagai perangkat digital sejatinya sudah dapat mendukung usaha, mulai dari pengelolaan keuangan, promosi produk, hingga perluasan pasar. Kenyataan, pada 2024 tercatat sekitar 35 persen UMKM di Indonesia belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal dalam kegiatan operasional mereka. Kondisi ini menjadi perhatian penting, karena laporan Bank Indonesia menunjukkan bahwa pelaku usaha yang telah mengadopsi teknologi digital berhasil meningkatkan penjualan hingga 30 persen, didorong oleh pemanfaatan *e-commerce* dan media sosial (Lestarini, 2025).

Dibalik kekhawatiran tersebut, terdapat potensi yang timbul dengan adanya tren peningkatan yang terus terjadi pada Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI). Di sisi lain, terdapat indikasi positif dari meningkatnya tren pemanfaatan teknologi, yang tercermin dalam Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI). Data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menunjukkan skor IMDI naik dari 37,80 pada 2022 menjadi 43,18 pada 2024 (Komdigi, 2025). Menteri Komdigi, Meutya Hafid, menambahkan bahwa tingkat optimisme digital di Indonesia mencapai 67 persen, menandakan generasi muda memiliki antusiasme dan keyakinan yang tinggi terhadap pemanfaatan teknologi digital.

Optimisme digital yang kuat di kalangan generasi muda menjadi titik awal untuk memahami posisi Generasi Z dalam perkembangan kewirausahaan saat ini. Generasi ini dikenal sebagai “*digital natives*” karena sejak awal telah berinteraksi dengan teknologi digital, sehingga relatif memiliki kepercayaan diri dan kemampuan yang baik dalam memanfaatkan

teknologi (Lee, 2021). Kondisi tersebut menjadikan mahasiswa sebagai kelompok yang memiliki peran strategis dalam penguatan kewirausahaan, karena pada tahap ini individu tidak hanya dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga didorong untuk mampu mengembangkan dan mengimplementasikan aktivitas usaha secara mandiri. Arah tersebut sejalan dengan kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang menempatkan kewirausahaan sebagai bagian dari proses pembelajaran di perguruan tinggi (Akbar & Fitriaty, 2024).

Mahasiswa yang berada pada usia relatif muda, cenderung memiliki fleksibilitas berpikir, keberanian berinovasi, serta kesiapan untuk mengambil risiko dalam mencoba peluang-peluang baru. Di tengah keterbatasan kesempatan kerja formal akibat kondisi perekonomian yang menantang dan tingginya tingkat persaingan, kewirausahaan menjadi alternatif rasional bagi mahasiswa sebagai generasi muda yang menempati jumlah individu pengangguran terbanyak untuk tidak hanya menciptakan sumber penghidupan bagi diri sendiri, tetapi juga membuka peluang kerja bagi pihak lain sebagai bagian dari kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kontribusi mahasiswa dalam aktivitas kewirausahaan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari penguatan nilai-nilai kebangsaan, terutama kesadaran akan bela negara. Pertumbuhan ekonomi yang semata-mata menekankan aspek inovasi dan ekspansi usaha berpotensi kehilangan arah apabila tidak didasarkan pada prinsip yang

mengedepankan kepentingan nasional. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik kewirausahaan di Indonesia masih cenderung didominasi oleh orientasi pada pencapaian keuntungan individual dibandingkan dengan kontribusi terhadap penguatan ekonomi nasional. Struktur industri nasional masih menghadapi ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor. Hingga tahun 2025, sekitar 70% bahan baku industri di Indonesia masih berasal dari Impor. Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husi, mengungkapkan bahwa Penggunaan bahan baku lokal masih kurang mendapat perhatian dari pelaku usaha, terutama karena proses perputaran modal dinilai tidak secepat ketika menggunakan bahan baku impor (Sandi, 2025).

Besarnya tingkat pembelian bahan baku impor menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang hanya memikirkan keuntungan pribadinya saja tanpa terfikirkan akan kontribusinya terhadap perekonomian negara. Pada praktik kewirausahaan, keputusan ekonomi seharusnya dilandasi pertimbangan nasional, termasuk keberpihakan terhadap produk, perusahaan, dan tenaga kerja dalam negeri, selama pilihan tersebut memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus ditanggung (Sulkowski et al., 2022). Pendekatan ini selaras dengan nilai-nilai dasar bela negara sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022, yang mencakup rasa cinta terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban demi

kepentingan bangsa dan negara, serta penguasaan kemampuan awal bela negara . Berdasarkan landasan tersebut, *financial patriotism* dipahami sebagai cara pandang dalam pengambilan keputusan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan peran dan kepentingan berbagai aktor ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas (Krysovaty et al., 2025).

Gagasan *financial patriotism* tidak hanya penting dibahas pada level nasional, tetapi juga relevan dianalisis dalam konteks daerah yang memiliki aktivitas perdagangan yang padat. Surabaya merupakan kota dengan karakter ekonomi yang kuat pada sektor perdagangan dan jasa. Didukung oleh keberadaan Pelabuhan Tanjung Perak yang berperan sebagai jalur utama distribusi barang di kawasan Indonesia timur, intensitas arus komoditas yang tinggi mencerminkan perputaran ekonomi yang dinamis di wilayah ini. Struktur perekonomian Surabaya bertumpu pada perdagangan, jasa, dan industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar PDRB. Bahkan, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, pada Desember 2025 menyatakan bahwa sekitar 90 persen pergerakan ekonomi kota ditopang oleh aktivitas perdagangan dan kewirausahaan (Pemerintah Kota Surabaya, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap keputusan usaha termasuk dalam menentukan sumber bahan baku dan arah pemasaran memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian daerah.

Besarnya pengaruh keputusan usaha terhadap pergerakan ekonomi Surabaya memperlihatkan bahwa keterlibatan mahasiswa sebagai pelaku dalam aktivitas kewirausahaan tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekonomi kota tersebut. Posisi mahasiswa sebagai kelompok terdidik menempatkan mereka tidak hanya sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai individu yang diharapkan memiliki kesadaran sosial dalam setiap pilihan ekonomi yang diambil. Peran perguruan tinggi menjadi penting dalam membentuk kerangka berpikir tersebut. Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan ke dalam proses pendidikan melalui mata kuliah Bela Negara yang bertujuan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rela berkorban untuk negara. Nilai-nilai ini diharapkan tidak berhenti sebagai pemahaman konseptual, tetapi tercermin dalam sikap dan pertimbangan mahasiswa ketika mengambil keputusan, termasuk dalam menjalankan kegiatan usaha.

Kompetensi akademik yang diperoleh mahasiswa berperan sebagai fondasi agar keterlibatan mereka dalam kegiatan usaha tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan semata. Di UPN Veteran Jawa Timur, terutama pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kurikulum setiap program studi memuat pembelajaran yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengambilan keputusan keuangan. Pembelajaran tersebut memberikan pemahaman mengenai proses perencanaan, pengawasan, serta penilaian kinerja keuangan usaha. Penguasaan aspek ini diharapkan mampu

membentuk pola pikir yang sistematis sehingga keputusan bisnis yang diambil menjadi lebih logis, terukur, dan berorientasi jangka panjang.

Perpaduan antara kecakapan teknis di bidang keuangan dan penanaman nilai kebangsaan membuka ruang untuk melihat bagaimana konsep *financial patriotism* dapat terwujud dalam praktik nyata mahasiswa. Penelitian ini diarahkan untuk menelaah bagaimana kemampuan pengelolaan keuangan yang dimiliki mahasiswa dipadukan dengan sikap kebangsaan yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur, khususnya dalam mencerminkan penerapan praktik *financial patriotism* pada aktivitas bisnis yang dijalankan. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman sejauh mana nilai-nilai yang dipelajari dalam konteks akademik mampu membentuk pola pengambilan keputusan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi usaha, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang lebih luas.

Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian empiris yang secara spesifik mengangkat konsep *financial patriotism*, terutama dalam konteks penerapannya oleh mahasiswa sebagai pelaku usaha, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan literatur dan memberikan perspektif baru dalam kajian kewirausahaan serta pengelolaan keuangan di lingkungan perguruan tinggi.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan usaha yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa

Timur yang menjalankan usaha, serta pertimbangan yang digunakan dalam setiap pengambilan keputusan keuangan. Kajian ini menyoroti keterkaitan antara kemampuan pengelolaan keuangan yang dimiliki mahasiswa dengan nilai-nilai kebangsaan yang diperoleh melalui pendidikan bela negara selama perkuliahan. Perhatian penelitian diarahkan pada ketercerminan kedua aspek tersebut dalam praktik pengelolaan keuangan usaha yang dijalankan mahasiswa, sehingga dapat menggambarkan wujud sikap *financial patriotism* dalam aktivitas bisnis mereka.

1.3 Rumusan Masalah

Atas dasar pemaparan latar belakang tersebut, pokok permasalahan yang dapat dikaji dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur menerapkan kemampuan pengelolaan keuangan saat menjalankan aktivitas usaha?
2. Bagaimana mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur memaknai hubungan antara praktik usaha mereka dengan nilai bela negara?
3. Bagaimana mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur memaknai hubungan antara praktik usaha mereka dengan sikap *financial patriotism* dalam kontribusi terhadap penguatan ekonomi nasional?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam kajian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan pemahaman mengenai kemampuan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur dalam mengelola keuangan usaha yang dijalankan.
2. Untuk mendeskripsikan penerapan nilai-nilai bela negara dalam praktik pengelolaan keuangan usaha yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis keterkaitan antara kemampuan pengelolaan keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur dengan sikap *financial patriotism* serta kontribusinya terhadap penguatan ekonomi nasional.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pemahaman mengenai praktik pengelolaan keuangan usaha yang dijalankan oleh mahasiswa, khususnya ketika dikaitkan dengan sikap *financial patriotism*. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan di bidang kewirausahaan dan pengelolaan keuangan dengan menghadirkan gambaran mengenai penerapan sikap *financial patriotism* pada mahasiswa. Penelitian ini melengkapi kajian yang selama ini lebih banyak berfokus pada aspek teknis pengelolaan keuangan. Melalui penelitian ini, sudut pandang tersebut diperluas dengan menunjukkan

bahwa setiap keputusan finansial yang diambil oleh pelaku usaha berkaitan dengan penguatan ekonomi nasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi penelitian selanjutnya yang membahas sikap *financial patriotism* dalam konteks mahasiswa atau pelaku usaha muda.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai realitas bagaimana mahasiswa menerapkan kemampuan pengelolaan keuangan dalam menjalankan usaha dengan mempertimbangkan orientasi terhadap kepentingan ekonomi yang lebih luas melalui sikap *financial patriotism*, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi mahasiswa pelaku usaha dalam menata keputusan keuangan yang diambil, serta menjadi masukan bagi lingkungan akademik dalam penguatan pembelajaran kewirausahaan agar lebih kontekstual dengan nilai dan orientasi ekonomi yang ingin dibangun.